

SOKOGURU MARADEKA (DEMOKRASI): LA TADDAMPARE PUANG RI MAGGALATUNG

SOKOGURU MARADEKA (DEMOCRACY:) LA TADDAMPARE PUANG RI MAGGALATUNG

Bahri¹, Andi Dewi Riang Tati²

Universitas Negeri Makassar

Jalan AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Makassar, 90222

Pos-el: bahrisejarah@gmail.com¹, madilfa@gmail.com²

Ponsel: 081342544522, 081241351822

Diterima: 6 Juli 2018; Direvisi: 12 September 2018; Disetujui: 30 November 2018

ABSTRACT

Each periodization of government in each kingdom has a different dynamic and is very determined by the king. The Kingdom of Wajo before the Government of Arung Matowa IV, Lataddampare Puang ri Maggalatung, had a down because the King of La Pateddungi was not able to be a good leader for his people. Puang ri Maggalatung also placed the king, after an agreement with his people was pledged. The mandate of the Wajo people to Puang ri Maggalatung is well executed. Leading democratically, honestly and fairly characterize his government. The success in leading the Kingdom of Wajo is proven by the expanding power territory, maintaining the economic life stability, and the structure of government was running well according to its functions, even the royal organization touched all levels of society. The research method used is historical research, descriptive analytical with the aim of finding and describing in an analysis and interpreting the teachings of La Taddampare Puang ri Maggalatung. Historical research is carried out through four stages, namely; heuristics, criticism, interpretation and historiography. At heuristic stage, the activities are to collect many sources and information as possible to be used as data, both literature and documentation. Source criticism has been obtained in heuristic activities, and then selected, both in form and content. After finding relevant facts, the next step is to interpret various or stand-alone facts to be made into a complete historical story. Interpretation is the cause of the author subjectivity. Historiography is the last stage of the whole series of historical writing methodologies.

Keywords: *Puang ri Maggalatung, the Kingdom of Wajo, Teaching and Leadership.*

ABSTRAK

Tiap periodisasi pemerintahan di setiap kerajaan memiliki dinamika yang berbeda dan sangat ditentukan oleh raja yang memerintah. Kerajaan Wajo sebelum Pemerintahan Arung Matowa IV, Lataddampare Puang ri Maggalatung, mengalami keterpurukan karena Raja La Pateddungi tidak mampu menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Puang ri Maggalatung pun naik tahta, setelah perjanjian dengan rakyatnya terikrar. Amanah rakyat Wajo kepada Puang ri Maggalatung dijalankan dengan baik. Memimpin secara demokratis, jujur, dan adil menjadi ciri dalam pemerintahannya. Keberhasilan dalam memimpin Kerajaan Wajo dibuktikan dengan wilayah kekuasaan bertambah luas, kehidupan ekonomi stabil, dan struktur pemerintahan berjalan baik sesuai fungsinya, bahkan organisasi perangkat kerajaan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah, bersifat deskriptif analitik dengan tujuan menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menginterpretasikan ajaran-ajaran La Taddampare Puang ri Maggalatung. Penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah sumber dan informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan data, baik kepustakaan maupun dokumentasi. Kritik sumber telah diperoleh pada kegiatan heuristik, kemudian diseleksi baik bentuk maupun isinya. Setelah ditemukan fakta-fakta yang relevan, tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan fakta-fakta yang beragam atau berdiri sendiri untuk dijadikan

¹Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar

²Dosen PGSD FIB Universitas Negeri Makassar

suatu kisah sejarah yang utuh. Interpretasi merupakan penyebab timbulnya subjektivitas penulis. Historiografi adalah tahapan terakhir dari seluruh rangkaian metodologi penulisan sejarah.

Kata Kunci: Puang ri Maggalatung, Kerajaan Wajo, ajaran dan kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Dalam *Lontara* Wajo disebutkan bahwa yang merintis negeri Cinnotabi' adalah *La Paukke* putra dari Datu Cinayang berganti nama menjadi Pammana, dikisahkan bahwa setelah Boli rusak maka *La Paukke* bersama para pengikut tinggal di suatu daerah yang bernama Cinnotta' Bangka, kemudian dinamai menjadi Cinnotabi'. Di daerah tersebut *La Paukke* dan pengikut membuka sawah, ladang, menangkap ikan dan berburu, dari hari ke hari daerah Cinnotabi' menjadi daerah ramai dan makmur. *La Paukke* diangkat oleh rakyat Cinnotabi' menjadi Raja I di daerah tersebut, lalu *La Paukke* memperistrikan putri yang bernama *I Pattola Arung Sailong* yang merupakan cucu dari *Arung Mampu*, dari pernikahan tersebut lahir putri bernama *I Pannangareng* putri *I Pannangareng* ini diperistri oleh *La Matatikka* saudara *La Mallalae* Datu Luwu (Abidin, 1985:349-351).

Setelah *Arung Cinnotabi IV* ini meninggal, maka rakyat Cinnotabi sepakat untuk mengangkat kedua putra beliau untuk melanjutkan *akkarungeng* (kepemimpinan), yang bernama *La Tenri Bali* dan *La Tenri Tippe* sebagai *Arung Cinnotabi V*, menjadi raja bersama yang dinamakan *napa' balisoi ia dua* (diseberangsunngalkan mereka berdua) (Kadir, 2000: 32-33). Namun, dalam proses *akkarungeng* kedua *arung* tidak berjalan mulus, keduanya memiliki ciri *akkarungeng* yang berbeda. Dalam melaksanakan pemerintahan *La Tenri Tippe* berbuat sewenang-wenang sehingga banyak rakyat lebih memilih untuk meninggalkan Cinnotabi (*sompe*), meskipun *La Tenri Tippe* sering dinasehati oleh ketiga sepupunya yang bernama *La Tenritau*, *La Tenripekka*, *La Matareng*. Namun, nasehat-nasehat tersebut tidak didengarkan *La Tenri Tippe*. Dari hari ke hari perilaku *La Tenri Tippe* makin bejat, sehingga ketiga sepupunya memilih untuk meninggalkan

Cinnotabi menuju ke daerah Boli. Begitu pula *La Tenribali* memilih untuk meninggalkan Cinnotabi, *sompe* ke daerah Penrang.

Sepeninggal *La Tenri Bali* sebagai *Batara Wajo I* yang menggantikan beliau yang menjadi *Batara Wajo II* ialah putranya yang bernama *La Mataesso* bersama *Pa'danreng* mengubah nama *Majauleng*, *Sa'bamparu* dan *Takkalalla* masing-masing menjadi *Bentempola*, *Talotenreng* dan *Tua*. *Batara Wajo II* termasyhur dalam pemerintahan sehingga *Wajo* menjadi lebih makmur, *La Mataesso* *Batara Wajo II* digantikan oleh putranya yang bernama *La Patteddungi Tosamallangi* sebagai *Batara Wajo III*, setelah lima tahun memerintah sebagai *Batara Wajo* moralnya mulai bejat, sama sekali tidak mewarisi sifat ayahnya. Beliau tidak lama memerintah karena tidak disenangi oleh rakyat, sehingga banyak orang *Wajo* pindah ke negeri lain, karena kesewenangannya lalu disuruh berhenti sebagai *Batara Wajo* dan dihukum mati untuk menebus segala dosa, yang menggantikan adalah *La Palewo To Palipung* dengan gelar baru yaitu *Arung Matoa*. Gelar inilah yang dipakai seterusnya mulai dari *Arung Matoa Wajo I* sampai *Arung Matoa Wajo XXXXV*. Sejak berdirinya *Wajo* pada abad XIV-XX jumlah *Arung Matoa Wajo* yang memerintah ialah 35 *matowa*, yang paling berjasa memperluas wilayah kekuasaan adalah *Arung Matoa Wajo IV La Tadampare Puang Rimanggalatung* yang memerintah tahun 1491-1521, seorang negarawan dan filosof hukum dan ahli ekonomi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian sejarah bersifat deskriptif analitik dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menginterpretasikan ajaran-ajaran *La Tadampare Puang ri Maggalatung*. Hal tersebut berarti bahwa penelitian ini melakukan analisis

terhadap keadaan dan perkembangan serta pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, perlu mendapat pertimbangan secara hati-hati dan teliti terutama bukti dan validitas sumber sejarah dan interpretasi dari keterangan yang diperoleh.

Metode sejarah adalah seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang sistematis yang diubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut dinilai secara kritis dan dapat menyajikan suatu sintesis dari hasil yang pada umumnya berbentuk tulisan atau historiografi. Pendapat itu diperkuat oleh Gottschalk (1985:96) yang menyatakan bahwa metode sejarah adalah suatu proses untuk menganalisa peninggalan masa lalu, yang dapat direkonstruksi secara imajinatif berdasarkan datadata yang diperoleh.

Secara teoritis, dalam penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penggunaan metode sejarah merupakan aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif. Kemudian menilai sumber tersebut secara historis, disajikan dengan sistematis sebagai hasil proses pengkajian bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menyusun suatu kerangka penulisan sejarah, maka kisah sejarah harus disajikan secara kronologis (Reiner, 1997:75).

Dalam kerangka penulisan sejarah, penulis akan mencoba menyusun data dan informasi objektif sesuatu fakta yang telah terkumpul secara deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdullah (1998:15) memberikan suatu argumen tentang sifat keobjektifan penulis-penulis sejarah, dimana sejarawan yang akan menulis hasil karya sejarah harus mencoba mengungkapkan dan memahami sejarah sebagaimana yang telah terjadi atau *historia realita*.

Teknik pengumpulan data dalam sejarah disebut heuristik, kegiatan ini dapat membantu sejarawan untuk mencari jejak-jejak peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Teknik tersebut, pada hakikatnya merangsang optimisme sejarawan agar dapat berbuat lebih baik pada

masa yang akan datang, dan menghasilkan satu hasil penelitian serta penulisan yang lebih bersifat kontemporer.

Pada tahap heuristik, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah sumber dan informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan data, baik kepustakaan maupun dengan dokumentasi. Sumber-sumber terkait baik berupa Lontara maupun berupa buku yang terkait dengan objek penelitian. Seperti *lontarak Wajo*, buku yang ditulis oleh Abdul Razak Daeng Patunru dan Zainal Abidin yang terkait dengan Kerajaan Wajo dan kepemimpinan dan ajaran La Taddampare puang ri Maggalatung. Pada tahap kritik sumber telah diperoleh pada kegiatan heuristik kemudian diseleksi dalam hal bentuk maupun isinya. Setelah ditemukan fakta-fakta yang relevan, tahap selanjutnya yaitu menginterpretasikan fakta-fakta yang beragam dan bahkan berdiri sendiri, untuk dijadikan suatu kisah sejarah yang utuh. Interpretasi sebagai penyebab timbulnya subjektivitas penulis. Dalam proses interpretasi sejarah, penulis harus mencapai faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa (Abdurahman, 1999:64).

Historiografi merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian metodologi penulisan sejarah. Pada tahapan ini penulis berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi sehingga dapat mengisahkan tentang nilai-nilai kepemimpinan Bugis yang berkearifan lokal di Kerajaan Wajo secara kronologis dan menghubungkan antara faktor-faktor yang turut mempengaruhi sehingga terjadi hubungan kausalitas.

PEMBAHASAN

Ajaran-ajaran La Taddampare Puang Ri Maggalatung

La Taddampare Puang ri Maggalattung merupakan putera dari La Lompiwanua dengan I Tenrilai. Beliau diusir dari Palakka karena dipersalahkan melakukan tindakan kejahatan yang tidak mencerminkan sebagai bangsawan di Bone. Beliau meninggalkan Bone dengan pengikutnya ±300 orang. Ketika menyeberangi

Sungai Walanae ditanggalkan pembelit pinggangnya dan dialirkannya, berkatalah “sekalipun kembali membelit punggungku setelah dihanyutkan arus deras, tidak akan kembali perbuatan jahatku, aku bertaubat yang disaksikan Yang Maha Kuasa (Abidin, 1985:424). La Taddampare menjadi Arung Matowa Wajo IV yang memerintah antara tahun 1401-1521.

Sistem pemerintahan di Wajo pada mulanya dipimpin raja bergelar *Batara Wajo*, selanjutnya raja bergelar *Arung Matowa*. Dalam hal pengangkatan pemimpin untuk mempersatukan kerajaan, maka Kerajaan Wajo mempunyai cara yang berbeda dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti yang dikemukakan “bahwa para pemimpin kelompok pendiri kerajaan telah mencari pemersatu dikalangan mereka sendiri” (Paranata, 1988:25). Dalam mekanisme pemilihan raja, tidak seperti kerajaan lain yang didahului dengan turunnya *to manurung*. Di Kerajaan Wajo dalam pemilihan raja dikenal istilah *mangnelle pasa*, artinya turun ke lapangan mencari calon pemimpin. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi raja, termasuk orang biasa, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin, misalnya; jujur, berani, bertanggungjawab. Pemilihan ini diawali dengan *tudang sipulung* yang menghadirkan *petta ennengge* (enam pimpinan *wanua*). Nilai demokrasi yang diberlakukan di Kerajaan Wajo tersebut, sehingga melahirkan istilah *maradeka to Wajoe, ade'nami napapoang* (merdekalah orang Wajo, adatlah yang dipertuan) (Zuhro, 2015:151-155). La Taddampare diangkat sebagai Arung Matowa sebagaimana kehendak rakyat:

Engkau tidak sudi, janganlah engkau tidak mau, engkaulah yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Esa membawa ke muka orang Wajo. Hindarkanlah mereka yang tidak baik, timbulkanlah mereka dalam kebaikan, engkau mengusahakan agar engkau bersama rakyat sampai kepada yang baik (Patunru, 1983:40)

La Taddampare akhirnya bersedia menjadi Arung Matowa IV dengan menyepakati traktat

bersama masyarakat Wajo. Adapun 4 pokok dari traktat tersebut adalah:

1. Arung Matowa harus menjaga masyarakat Wajo dari bahaya musuh;
2. Arung Matowa harus menjaga kecukupan makanan dalam negeri;
3. Arung Matowa harus menghindarkan warganya dari saling membunuh, dan memberikan kemungkinan adanya pertimbangan yang adil terhadap kejahatan dan adanya pengampunan;
4. Bahwa didalam perkara terjamin adanya pertimbangan yang adil (Patunru, 1993:40).

Bilamana Arung Matowa tidak memenuhi salah satu pokok perjanjian tersebut, maka dapat diganti. Setelah La Taddampare dilantik menjadi Arung Matowa IV, mulailah melaksanakan pemerintahannya yang menggantikan La Tenri Umpu Arung Matowa II.

Kepemimpinan dan Ajarannya

Pemimpin merupakan orang penting dalam menentukan jalannya pemerintahan. Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang yang mencintainya atau mengikutinya atau yang memancarkan suatu pengaruh, suatu kekuatan atau wibawa yang sedemikian rupa sehingga membuat kelompok-kelompok orang melakukan apa yang dikehendaki (Atmosudiryo, 1970:39).

Fakta sejarah beberapa di antaranya telah memberikan contoh bahwa peranan seorang pemimpin sangat menentukan dinamika kehidupan rakyat. Eksistensi suatu bangsa atau kerajaan dipengaruhi oleh pemimpinnya. Dalam pemerintahan Kerajaan Wajo, peranan La Taddampare sangat besar terhadap perkembangan Kerajaan Wajo. Beliau menjadi teladan rakyat. La Taddampare puang ri Maggalatung dalam pemerintahannya selalu memberikan perhatian kepada rakyatnya, tergambarkan dalam salah satu ungkapannya bahwa: wahai kalian, tidak adakah yang dapat kamu kerjakan, sehingga engkau hanya berpangku tangan. Kalau

tidak ada pekerjaanmu lebih baik ke istana mendengarkan bicara pembesar adat, ataukah ke pasar mendengarkan bicara penjual. Hanya dengan bekerja keras dengan ikhlas mendapat berkah dari Allah Swt. (Abidin, 1985). La Taddampare tidak senang sikap malas dan pasrah kepada takdir sebelum berusaha. Beliau selalu menganjurkan untuk selalu dinamis, kreatif, serta mempunyai pandangan yang luas dan berkemajuan. Beliau memandang semua manusia pada hakikatnya dilahirkan merdeka atau bebas serta memiliki harkat dan martabat yang sama di mata *Dewata Seuwae* (Tuhan Yang Esa). La Taddampare Puang Ri Maggalatung menyapa rakyatnya dengan panggilan “*ana’ eppoku*”, yang berarti anak-cucu, bukan “*atakku*” (hambaku) (Halim, 2016)

La Taddampare dalam melaksanakan pemerintahan bersikap adil dan bijaksana serta selalu berada di tengah-tengah masyarakatnya dalam keadaan bagaimanapun. Kepribadiannya menjadi tauladan bagi masyarakat Wajo. Kesetiaan rakyat terhadap pemerintahannya sangat tinggi, persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat sangat menonjol. Komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah berjalan dengan penuh kerukunan dan kedamaian karena kepemimpinan hakikatnya suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang diinginkan bersama (Siagian, 1970:97).

La Taddampare Puang Ri Maggalatung merupakan sosok *topanrita*. Sebagaimana digambarkan di banyak Lontara, sebagai Arung Matoa Wajo ke-4, dia menampilkan diri sebagai pemimpin dan cendekiawan yang cerdas, adil, tegas dan bijaksana sehingga di masa pemerintahannya Kerajaan Wajo mencapai puncak kegemilangan, misalnya; struktur kerajaan, perkembangan wilayah kekuasaan, tatanan pemerintahan yang bercorak demokrasi serta kesejahteraan rakyatnya. Beberapa petuah La Taddampare Puang ri Maggalatung masih sering dikutip dan diselipkan dalam pembicaraan-pembicaraan orang-orang tua Bugis pada masa kini. Salah satu ungkapan yang terkenal

dan belakangan bahkan juga menjadi motto Kabupaten Wajo adalah *maradeka to Wajo’E ade’nami napopuang* (Orang Wajo merdeka, hanya konstitusi yang dipertuan). Bentuk lengkap ungkapan tersebut, yang juga menjadi *ade’ ammaradèkangenna to Wajo’e* (prinsip dasar hak-hak kemerdekaan orang-orang Wajo) adalah “*Maradèka to Wajo’è, najajiang alèna maradèka, tanaèmi ata, naia to makkètanaè maradèka maneng, ade’ assamaturusenami napopuang.*” (Orang Wajo itu merdeka dan dilahirkan merdeka. Hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah merdeka. Hanya adat permufakatan [konsensus] mereka yang mereka patuhi). Dengan prinsip ini, orang-orang Wajo sejatinya hanya terikat oleh perintah seorang raja (Arung Matoa) selama perintah itu bersesuaian dengan *ade’ assamaturusenna to Wajo’è* (konsensus orang-orang Wajo) (Halim, 2012).

Salah satu nilai karakter yang ditekankan oleh *to acca* adalah sikap *getteng*, termasuk yang diamanatkan oleh Puang Rimaggalatung. Seseorang dapat bertindak tegas jika dibarengi dengan kebenaran. Dalam hal memegang tampuk pemerintahan, pemerintah dikatakan tegas jika bertindak secara jelas, nyata, dan pasti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tegas tidak hanya taat pada aturan, tetapi juga taat pada kebenaran.

Makkedai Puang Rimaggalatung, na ia mpawa e jak ri loanrumang e iana ritu gaukna Arung e ri to maega e narekko mare massepei balawo e iana ritu engka bicara ritamua unganna najjai to mabbicara e temmitai. Artinya: Kata Puang Rimaggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika tikus makan dan tidak menyeluruh, disebabkan adanya perkara yang dapat diselesaikan sengaja tidak diperhatikan oleh hakim (Darmawati, 2014:13).

Berkenaan dengan sikap tegas pemerintah atau hakim, nasihat tersebut menunjukkan sifat hakim yang dapat menyelesaikan perkara,

namun keputusan diabaikan atau sengaja tidak diperhatikan. Kenyataan demikian ditandai dengan gagal panen bagi masyarakat Wajo karena ulah tikus yang memakan padi secara tidak menyeluruh. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketegasan dapat diterapkan jika dibarengi dengan kebenaran. Oleh karena itu, jika terjadi gagal panen seperti ini kemungkinan besar keputusan hakim tidak dibarengi dengan kebenaran.

Makkedai Puang Rimaggalatung, na ia mpawa e jak ri loanrumang e iana ritu gaukna Arung e ri to maega e narekko narapikni tikkeng lise asewe nadek nallisek bicara pura ritu tenri pallisek. Artinya: Kata Puang Rimaggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika tiba masanya padi berbuah lalu tidak kunjung berisi tandanya ada perkara sudah diputuskan, tetapi tidak diberlakukan. Selain karena ulah tikus, gagal panen dapat diakibatkan juga oleh jika tiba masanya padi berbuah, namun tidak kunjung berisi (Darmawati, 2014:14).

Nasihat tersebut menjelaskan bahwa padi yang tidak berisi pada masanya berbuah menunjukkan sifat pemerintah atau hakim yang dapat menyelesaikan perkara, namun tidak dapat menjalankan keputusannya secara tegas. Keputusan tidak dapat diterapkan secara tegas jika tidak dibarengi dengan kebenaran. Kenyataan demikian dapat mengakibatkan gagal panen bagi masyarakat Wajo. *Paseng* tersebut menegaskan bahwa gagal panen terjadi oleh karena hakim memutuskan perkara tanpa berpijak pada kebenaran.

Makkedai Puang Rimaggalatung, o Tonampe, ajakmuluka bicara pura namubicara paimeng iana ritu riaseng poppok gamaruk teppolei asee. Artinya: Berkata Puang Rimaggalatung; Wahai Tonampe, janganlah engkau membatalkan

perkara yang sudah putus lalu kamu bicarakan kembali. Itulah yang dikatakan memecahkan piring padi tidak menjadi (Darmawati,2014:15).

Puang ri Maggalatung di Wajo mengutamakan penyelenggaraan hukum (*ade*) secara adil. Ungkapan orang Wajo mengatakan *maradeka to Wajoe, ade' nami napopuang* (merdeka orang Wajo hanya adatnya saja yang di pertuan). Apapun dan siapapun tidak mengikuti adat, orang Wajo akan menolak. Semua orang harus taat dan hormat kepada aturan hukum yang telah disepakati. Adat itulah yang dijunjung tinggi dan lebih utama dari segalanya. Orang Wajo dikenal sangat patuh dengan pemufakatan, sebagaimana diikrarkan pendahulu.

Nigi-nigi mpleai assisama turuseng, reppai ppada toha reppaa pinceg lebbie naittello egkae nageppa batu relalengna galempongge. Pura ripettuini makkeddae pannennungennai assidengetta, pada toha assiamenna duwae pong cempa engkae ritaneng dilalengna galempongenge. Artinya: Barang siapa yang menyalahi kata mufakat, maka ia hancur seperti hancurnya piring dan telur yang tertimpa batu dalam lubang. Sudah diputuskan bahwa satukan tekad kita seperti bersatunya bibit pohon asam yang ditanam dalam lubang (Sirapang dkk, 2012:31).

Pentingnya keadilan dalam menyelesaikan masalah menuntut pemerintah atau hakim untuk selalu berlaku adil. Tanpa keadilan, harmonisasi antara pemimpin dan yang dipimpin sulit tercapai. Hal demikian sejalan dengan nasihat Puang Rimaggalatung.

Na ia mpawa e jak ri loanrumang e iana ritu narekko teani maruwae wekkadua pananrang bicara maceko nabicara Arung e. Artinya: kata Puang Rimaggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara musim hujan tidak turun dua kali setahun pertanda raja dan hakim menyelewengkan peraturan. Puang Rimaggalatung menganggap

musibah yang melanda suatu negeri disebabkan oleh pemerintah atau hakim yang menyelewengkan peraturan sebagaimana tertera pada nasihat. Dalam mengemban amanah, tindakan penyelewengan terhadap peraturan yang telah disepakati sangat ditentang oleh masyarakat karena berakibat buruk. Sifat menyelewengkan aturan merupakan salah satu sifat pemerintah yang tidak adil dan tidak pantas mengemban amanah masyarakat.

Makkedai Puang Rimaggalatung, na ia mpawa e jak ri loanrumange iana ritu gaukna Arunge ri to maegae na ia narekko napaenreki akkanrenna balawoe ri petau galunge iana ritu makkalopeki to mabbicarae. Artinya: kata Puang Rimaggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika tikus menaikkan bekas makanannya di pematang sawah, tandanya bahwa *pabbicara* memihak. Bukan hanya kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya gagal panen, melainkan juga karena ulah tikus yang merusak padi. Jika tikus menaikkan bekas makanannya di pematang sawah.

Keberpihakan pemerintah atau hakim dalam memutuskan suatu perkara merugikan pihak yang didakwa melakukan kesalahan. Keberpihakan dalam memutuskan suatu perkara mencerminkan sifat hakim yang tidak adil. Sebaliknya, hakim yang adil senantiasa berkiblat pada kebenaran dan tidak memihak dalam memutuskan perkara.

Makkedai Puang Rimaggalatung, ianaro kupasengekko Tonampe sibawa anak eppoku silisek, eppa urekna bicarae, 1) tutu e wali-wali, 2) sabbie wali-wali, 3) onro e wali-wali, maeppana barangkaukna wali-wali, pasitimbang-timbang narekko motokno rekko elei iaiannani nawerekk Dewatae iani murettekengi pattarona tu Dewatae. Artinya: berkata Puang

Rimaggalatung, yang aku pesankan kepadamu hai Tonampe serta anak cucuku sekalian bahwa suatu perkara mempunyai empat faktor: 1) keterangan kedua belah pihak; 2) saksi kedua belah pihak; 3) kedudukan kedua belah pihak; 4) tingkah laku kedua belah pihak, pertimbangkanlah. Apabila engkau sudah bangun di pagi hari, apa saja yang diilhamkan Tuhan kepadamu, itulah engkau ambil sebagai keputusan, keputusan itulah yang Tuhan inginkan.

Pemerintah atau hakim yang adil memperhatikan empat hal pokok, yaitu keterangan, saksi, kedudukan, dan tingkah laku kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal memutuskan perkara, hakim dapat mengambil keputusan secara bertahap berdasarkan empat hal tersebut. Jika telah melewati tahapan tersebut dan masih berimbang, disarankan untuk menyucikan diri, berbaring seorang diri, dan menyerahkan perkara tersebut kepada Tuhan. Keputusan dapat ditetapkan setelah bangun tidur dan mendapat ilham dari Yang Mahakuasa. Dengan demikian, hakim memutuskan perkara sesuai petunjuk-Nya dan membawa keberkahan kepada seluruh rakyat.

Makkedai Puang Rimaggalatung, na ia bicarae Tonampe, atutui madecengi iapa ritu nariaseng bicaranna narekko tessiewai to pabbicarae na to ribicarae nalolongengi taue assitinajanna bicarae mupappada-padapi ininnawammu ri tau mappangewange na dek namawerrek barasseuwanna. Artinya: kata Puang Rimaggalatung, Wahai Tonampe, jagalah perundang-undangan itu sebaik-baiknya. Suatu keputusan dapat dikatakan tepat jika tidak ada pertentangan antara yang mengadili dan yang diadili mendapat kepatutan peradilan. Engkau yang bersengketa tidak berat sebelah.

Sehubungan dengan empat hal pokok dalam perkara dan adanya keputusan tertinggi sesuai petunjuk-Nya yang membawa keberkahan

kepada masyarakat, nasihat mengamanatkan agar masyarakat Wajo menjaga nasihat dengan sebaik-baiknya sebagai undang-undang bersama. Dengan demikian, hakim dapat mengikuti undang-undang tersebut dalam memutuskan perkara untuk menghasilkan keputusan yang adil. Di samping itu, masyarakat Wajo diamanatkan agar menjunjung tinggi keputusan yang adil dengan berdasar pada kebenaran dan tidak memihak.

Pada masa pemerintahan Puang Rimanggalatung, masyarakat Wajo sangat menaati adat yang berlaku. Hal tersebut ditopang oleh adat dan nilai budaya yang masih kuat. Senantiasa patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya amanat Puang Rimanggalatung berikut:

Makkedai Puang Rimanggalatung, o Tonampe, isseng i sia adek pura onroe temmakkulleisa rirusak, mau riassimanengi tenrirusak to. Artinya: berkata Puang Rimanggalatung, Tonampe, ketahuilah bahwa adat yang sudah turun-temurun tidak boleh dirusak, walau dengan kesepakatan tidak boleh juga diubah. *Makkedai Puang Rimanggalatung, na ia riwinru e adek kuwi pole ri allibungeng e tennaripuek kua toi ri appada eloreng e tenna rirusak kutoi ri assama turuseng e tenna riwelai.* Artinya: berkata Puang Rimanggalatung, adapun adat terbentuk dari kebulatan mufakat yang tidak dipertentangkan, kehendak bersama yang tidak dibatalkan, persetujuan bersama yang tidak diingkari (Nawir, 1999:45-55).

Nasihat pertama menyatakan bahwa aturan adat akan berlaku secara turun-temurun dan tidak boleh diubah. Adapun nasihat kedua menyatakan bahwa aturan adat telah dimufakati bersama dan hasil mufakat tersebut wajib dijalankan. Kedua nasihat tersebut menjelaskan tentang kesakralan setiap aturan yang telah ditetapkan sebagai hasil pemufakatan bersama. Oleh sebab itu, pemerintah bersama jajarannya dan seluruh lapisan masyarakat harus menjunjung tinggi setiap aturan yang tertuang dalam adat, bahkan

mewariskan kepada generasi mendatang.

Kepemimpinan La Taddampare sangat berkesan bagi rakyat. Keteladanan seorang pemimpin tergambarkan dalam 3 ajarannya sebagai sumber kebaikan;

- a) Kejujuran dan kepandaian yang paling baik ditanamkan pada diri, itu juga yang tidak bercerai dengan Dewata Tunggal. Yang disebut pandai ialah kemampuan untuk melihat akibat perbuatan dan dikerjakan adalah yang baik, bila dapat mendatangkan keburukan, jangan lakukan. Bila tidak baik, jangan dikerjakan, karena kembali juga nanti keburukannya kepadamu;
- b) Ada empat sifat pemegang bicara itu dan hanya satu yang mendatangkan kebaikan negeri yaitu: 1) jika amarah pada orang yang dipergunakan memutus perkara, diingat pada waktu bersalah padanya, lalu itulah yang dipukulkan, sedangkan pada hakikatnya orang di pihak benar lalu dipersalahkan, maka sifat apilah yang bergerak. Adapun api itu berbuat besar dan tidak memandang akibatnya, 2) bicara yang merusak negeri kegembiraannya kepada seseorang yang dipakai memutus, sebab telah diberikan kepadanya harta benda oleh orang yang dibicarakan, itulah mengambil sogokan, maka sifat angin sifatnya. Adapun angin itu bertindak kuat, tetapi tidak jujur, hanya ada yang dapat dijalani lalu disuruh menjalani, pernah dari barat, pernah dari timur, 3) *pabbicara* yang merusak negeri, ialah belas kasihan yang dipakai memutus perkara. Itulah *pabbicara* yang menjerat, yang seharusnya dipersalahkan tetapi dibenarkan. Sifat air yang bergerak. Adapun air itu pintar dan teliti, tetapi tidak tegas, di mana daratan rengah, di mana yang hina, ke sanalah mengalir, 4) dipertimbangkan kedua belah pihak akar bicara yang empat, diteliti semua agar dapat memohon kepada *dewata tunggal*, agar tidak di kiri tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak memandang

ke bawah, tidak memandang ke atas. Tidak ada yang hendak diambil selain daripada apa yang menurut kata hatinya benar dan mencari kebenaran. Yang bersalah dicari kesalahannya, dilihat yang dua itu, maka diserahkan kebenaran kepada yang benar dan diberinya pula kesalahan kepada yang salah. Berkata orang yang salah, kebenarannya itulah sifat tanah yang bergerak, jujur dan kuat, memperhadapkan juga dan tidak diperhadapkan, mengumpulkan dan tidak dikumpulkan, menengadahkan dan tidak ditengadahkan, itu peradilan yang mendatangkan kebaikan negeri;

- c) Tiga pokok asal kebaikan; 1) kejujuran. 2) kepintaran, 3) takut pada dewata. Adapun yang disebut kejujuran tidak menghendaki jahat sesama manusia serta dirinya, tidak mengingini harta benda sesama insan. Adapun asal kepintaran ialah pikiran yang baik, memanjangkan pula umur dan diwarisi oleh anak cucu, memperbaiki juga negeri dan orang banyak. Yang disebut takut kepada dewata ialah tidak mengatakan kata bohong, tidak mengeluarkan kata buruk dari mulut, yang disebut hanya yang dikehendaki oleh *dewata*, sebab kemarahan itu adalah kata yang melawan kepada dewata (Pemerintah Kab.Wajo, 151).

Beliau adalah seorang bertipe pemimpin demokratis, tergambarkan dalam ungkapannya adapun yang dibuat adat, asalnya dari kebulatan yang terbelahkan, ia juga lahir dari kehendak bersama dan tidak rusak, dari persetujuan bersama dan tidak ditinggalkan. La Taddampare dalam pemerintahannya senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerintahan La Taddampare yang berlangsung selama 30 tahun, Wajo tidak pernah hampa padinya dan tidak pernah kekurangan makanan. Kemakmuran Wajo berdampak pula

pada perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo pada saat itu meliputi wilayah:

1. Di bagian utara meliputi La Rompong, Batulappa, Massenrengpulu;
2. Di bagian barat meliputi Bilawa, Utting, Rappang, Bulu Cenrana;
3. Di bagian timur meliputi Pompanua, Amli, Langea dan Mampu;
4. Di bagian selatan meliputi Baringeng, Pattojo (Patunru, 1983:41)

Untuk mengurus daerah yang sangat luas, agar hubungan pusat dengan daerah lebih dekat, maka setiap daerah diberikan wewenang mengurus daerahnya masing-masing yang dikepalai oleh *ranreng*. Sedangkan kegiatan administrasi pemerintahan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah dengan maksud mengurangi beban pemerintah pusat. Kerajaan Wajo pada masa beliau memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Dalam struktur Kerajaan Wajo dilengkapi 4 bidang yang mengurus pekerjaan rakyat, yaitu;

1. *Pakkaja* (nelayan) diangkat *matoa* nelayan yang bertugas untuk memutuskan perkara mengenai nelayan;
2. *Pallao rumah* (petani, tukang kebun) diangkat *matoa* petani dengan tugas untuk menyelesaikan permasalahan pertanian;
3. *Passari* (penyadap nira), diangkat seorang *matoa* dengan tugas menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat *passari*
4. *Pabbalu* (pedagang) diangkat *matoa-pabbalu* untuk menyelesaikan perselisihan dikalangan *pabbalu* (tn, 1968)

Pelras (2006:134) mengemukakan bahwa La Taddampare' yang terpilih sebagai Arung Matowa pada 1498 merupakan raja Bugis yang sangat dihormati dan salah seorang raja yang berhasil mengubah Wajo menjadi salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Sejak Puang ri Maggalatung memegang pemerintahan sebagai Arung Matoa IV, sistem pemerintahan berjalan dengan baik, rakyatnya pun tentram dan sejahtera,

perluasan wilayah pun digalakkan sehingga Wajo menjadi suatu kerajaan besar. La Taddampare sangat besar jasanya dalam memerintah Kerajaan Wajo. Keadilan dan kemakmuran terwujud sebagaimana mestinya. Setelah 30 tahun memerintah dari tahun 1491-1581, La Taddampare tidak dapat lagi mengendalikan pemerintahannya karena sudah tua ditambah lagi sakitnya yang keras. La Taddampare berpesan kepada rakyat Wajo bahwa yang berhak memimpin Kerajaan Wajo sepeninggal dirinya adalah memiliki empat sifat: 1) *palempuriéngngi aléna ri to wawanna* (jujur kepada bawahan), (2) *temmatinro matanna nawa-nawai adécéngenna akkarungenna* (matanya tidak tidur memikirkan kebaikan negerinya), (3) *masémpoé ri to wawanna, mappanré mappainung* (murah hati dalam memberi makan dan minum), (4) *waranié ininawanna taro bicara malempu', tennakkini' napoléi biritta maja' biritta madéceng' polé ri bali wanua* (tidak gentar terhadap kritik dunia luar atas keputusan, inovasi dan kreativitas yang ia lakukan), (5) *macca mpinru', matu', duppai nenniya moloji ada, maccatoi pattingara ada* (terampil berkomunikasi dan berdiplomasi) (Abidin, 1985:271-272). La Taddampare meninggal dunia dan dikuburkan di sebelah Utara Wajo, di bawah pohon *aju uleng*, digantikan La Tentre Pakado To Nampe atas persetujuan rakyat Wajo.

PENUTUP

Nilai sejarah yang termaktub dalam berbagai *paseng* yang diutarakan oleh Puang ri Maggalatung memberikan sumbangsih yang begitu besar dalam perkembangan Kerajaan Wajo pada saat itu. *Paseng* tersebut hingga saat ini menjadi referensi dalam mewujudkan hakikat nilai demokrasi yang hakiki. Pada masa pemerintahan La Taddampare Puang ri Maggalatung telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan Kerajaan Wajo. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, misalnya struktur kerajaan, perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan, tatanan demokrasi yang berjalan dengan baik serta kehiduapn

sejahtera oleh masyarakatnya. Berbagai ajaran dari La Taddampare Puang ri Maggalatung mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi referensi bagi pemerintahan (demokrasi) saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A. Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abidin, Andi Zainal. (1985). *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Tependam Sulawesi Selatan*. Bandung: Alumni.
- Atmosudiryo, Prayudi. 1970. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Gung Agung.
- Darmawati, Besse. "Kearifan Sistem Pemerintahan Puang Rimaggalatung Dalam Lontarak Bugis". *Jurnal Meta Sastra*, Vol. 7 No. 1 (2014) <http://ejournalbalaibahasa.id/>.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Halim, Wahyudi. 2016. *Eksplorasi Atas Praktik dan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kerajaan Wajo' Abad Ke-15/16 dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Demokrasi Modern*, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 18 No. 2 Tahun 2016.
- Halim, Wahyudi. 2012. Arung, Topanrita dan Anregurutta Dalam Masyarakat Bugis Abad XX, *Jurnal Al- Ulum* Volume. 12, Nomor 2, Desember 2012.
- Kadir, Shaifuddin. 2000, *Spirit of Wajo*. Sengkang: Yayasan Pena Mas.
- Nawir. 2008/2009. *Kepemimpinan dan Ajaran-Ajaran La Taddampare Puang Rimaggalatung Sebagai Arung Matowa Wajo ke IV*. Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Paranata, Andi. 1988. *Silsilah Raja Wajo*, Wajo.
Patunru. Abdul RAzak Daeng. 1983. *Sejarah Wajo*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
- Pelras, Christian. 2006. *The Bugis*. Diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, EFEO.
- Renier, GJ. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Diterjemahkan oleh Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian S.P. 1976. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Jakarta; Gunung Agung.
- Sarapang, Simon Sirua dkk. 2012. *Tenun Wajo Dalam Menghadapi Badai Krisis Ekonomi 1930-1998*. Makassar: De Lamacca.
- tn, *Catatan Struktur Masyarakat Wajo*. 1968. Sengkang
- Zuhro, Siti. 2015. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.